BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemudahan akses perkreditan atau pembiayaan merupakan salah satu aspek penting dalam menciptakan sistem keuangan yang sehat dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kemudahan akses perkreditan atau pembiayaan perlu didukung dengan adanya sistem informasi yang berfungsi sebagai sarana pertukaran informasi kredit antar lembaga jasa keuangan. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Otoritas Jasa Keuangan diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengembangkan penyelenggaraan sistem informasi antar bank yang dapat diperluas dengan menyertakan lembaga lain di bidang keuangan. Oleh sebab itu, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Otoritas Jasa Keuangan memandang perlu mengembangkan sebuah sistem baru untuk mendukung akses informasi perkreditan melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

SLIK yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan berfungsi sebagai sarana untuk menghimpun, mengelola, dan menyebarluaskan informasi keuangan debitur kepada lembaga jasa keuangan. SLIK merupakan pengganti Sistem Informasi Debitur yang sebelumnya dikelola oleh Bank Indonesia. Implementasi SLIK oleh OJK secara penuh mulai tanggal 1 Januari 2018 dan diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 18/POJK.03/2017 tanggal 5 Mei 2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Keuangan (POJK SLIK).

ring berjalannya waktu, intensitas pemanfaatan SLIK baik oleh
‹at maupun Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) terus mengalami

Optimized using
trial version
www.balesio.com

peningkatan yang sangat signifikan. Berbagai tantangan mulai bermunculan seperti masalah teknis dan aksesibilitas. Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, OJK menerapkan pendekatan Agile Performance Management (APM). APM merupakan pendekatan manajemen kinerja modern yang mengedepankan fleksibilitas, kolaborasi lintas unit, pengambilan keputusan berbasis data, serta adaptasi terhadap perubahan secara cepat. Pendekatan ini dinilai relevan dengan kebutuhan pengembangan SLIK yang dinamis, terutama dalam konteks pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

Penerapan APM dalam pengelolaan dan peningkatan sistem SLIK diharapkan mampu mendorong peningkatan *performance* SLIK khususnya dalam merespons tuntutan stakeholders secara lebih tepat dan meningkatkan kepuasan pengguna layanan informasi keuangan.

Melalui penelitian kualitatif ini, penulis ingin mengeksplorasi bagaimana strategi inovatif berbasis *Agile Performance Management* dapat diterapkan dalam konteks kelembagaan seperti OJK untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi SLIK.

Saat ini, Perkembangan teknologi informasi yang pesat mendorong transformasi layanan jasa keuangan di Indonesia menuju digitalisasi. Transformasi digital menjadi fenomena yang mendalam dan komprehensif dalam dunia organisasi, yang merujuk pada penerapan teknologi digital untuk merubah proses operasional, budaya kerja, dan model bisnis guna menciptakan nilai tambah yang lebih besar. Perubahan ini tidak hanya melibatkan pengadopsian teknologi canggih, tetapi juga mencakup perubahan dalam cara organisasi berinteraksi dengan pelanggan, mengelola data, serta merancang dan mengimplementasikan

isnis.

am konteks lembaga pemerintah, khususnya sektor jasa keuangan,

ıasi digital memiliki peran krusial dalam mempercepat efisiensi

Optimized using
trial version
www.balesio.com

operasional, meningkatkan kualitas layanan publik, serta memfasilitasi transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik. Digitalisasi memberikan peluang besar untuk memperbaiki proses yang sebelumnya bersifat manual, meminimalkan kesalahan, serta mempercepat pengambilan keputusan yang berbasis data (Bounfour, 2016).

Salah satu sektor yang mengalami dampak signifikan dari digitalisasi adalah sektor jasa keuangan. Transformasi digital dalam layanan jasa keuangan telah mengubah cara masyarakat mengakses, menggunakan, dan memahami produk dan jasa keuangan. Layanan jasa keuangan yang sebelumnya bersifat manual kini beralih ke platform digital berbasis aplikasi dan sistem online. Digitalisasi ini memungkinkan peningkatan inklusi keuangan, efisiensi transaksi, pengelolaan risiko yang lebih baik, serta penyediaan data yang lebih akurat dan *real-time* bagi lembaga keuangan.

Salah satu upaya strategis dalam mendukung transparansi, kemudahan akses, dan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan adalah melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). SLIK merupakan pengembangan dari Sistem Informasi Debitur (SID) yang sebelumnya dioperasikan oleh Bank Indonesia, dan kini menjadi platform utama untuk penyediaan informasi debitur kepada lembaga jasa keuangan serta masyarakat luas.

Penerapan transformasi digital pada SLIK di OJK bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sistem dalam memberikan informasi keuangan yang lebih real-time, akurat, serta dapat diakses dengan mudah oleh seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam ekosistem keuangan. Keberhasilan digitalisasi akan berkontribusi pada efektivitas pengawasan terhadap lembaga ı, serta meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data yang dapat n untuk pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Transformasi digital yang efektif pada SLIK diharapkan dapat meningkatkan kinerja operasional OJK, mempercepat proses layanan informasi keuangan, serta memperkuat posisi OJK dalam pengawasan sektor keuangan di Indonesia. Dalam menghadapi perubahan ini, penting untuk menilai bagaimana penerapan digitalisasi dapat mempengaruhi *agile performance* organisasi, khususnya dalam hal kelincahan dan kemampuan untuk merespons perubahan dengan cepat. *Agile performance* merujuk pada kemampuan suatu organisasi untuk beradaptasi, berinovasi, dan bereaksi dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal maupun internal. Konsep ini penting dalam konteks transformasi digital, di mana organisasi perlu fleksibel dalam mengelola perubahan, melakukan pembaruan teknologi secara berkelanjutan, serta mempertahankan efisiensi dalam pengambilan Keputusan (Perkin & Abraham, 2017).

OJK Sebagai lembaga independen yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 berfungsi untuk mengatur dan mengawasi seluruh sektor jasa keuangan, termasuk memastikan keterbukaan informasi kredit melalui SLIK. SLIK dimanfaatkan untuk mendukung Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam proses analisis penyediaan dana, penerapan manajemen risiko kredit atau pembiayaan dan risiko asuransi atau penjaminan, serta kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan usaha pada LJK.

Berikut data Permintaan SLIK debitur yang dilaporkan oleh LJK dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1 Permintaan SLIK Debitur oleh Pelapor Lembaga Jasa Keuangan (LJK)

Jenis Pelapor	Tahun					Total
	2020	2021	2022	2023	2024	
ıum ional	1,151	1,140	1,130	1,107	828	5,356
ıum Syariah	168	144	149	156	126	743

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Jenis Pelapor	Tahun					Total
	2020	2021	2022	2023	2024	
Unit Usaha Syariah	240	244	247	240	171	1,142
BPR Konvensional	18,313	17,941	17,489	16,998	12,481	83,222
BPR Syariah	1,957	1,962	1,986	2,052	1,561	9,518
Perusahaan Pembiayaan	2,121	1,938	1,812	1,764	1,298	8,933
Perusahaan Modal Ventura	120	171	248	597	441	1,577
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	0	0	2	24	18	44
Perusahaan Pembiayaan Syariah	407	396	396	393	271	1,863
Perusahaan Modal Ventura Syariah	12	23	28	72	54	189
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah	0	0	1	12	9	22
Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	36	36	36	36	27	171
Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Syariah	12	12	14	24	18	80
Perusahaan Efek (PE)	0	1,309	1,406	1,398	1,044	5,157
Lembaga Pendanaan Efek	0	1	12	12	9	34
Lembaga Non Lembaga Jasa Keuangan	48	48	48	48	36	228
Total Keselurahan	24,585	25,365	25,004	24,933	18,392	118,279

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Pada Tabel 1 di atas, menunjukkan peningkatan permintaan SLIK Debitur oleh pelapor Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dari tahun 2020 hingga 2024. P[illegible]an tertinggi berasal dari Bank Umum Konvensional dan BPR [illegible]onal, yang menunjukkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi yang [illegible]hkan akses informasi kredit. Selain itu, permintaan dari Bank Umum

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Syariah dan Unit Usaha Syariah juga mengalami kenaikan, mencerminkan pertumbuhan sektor keuangan syariah. Hal ini mengindikasikan perlunya digitalisasi sistem SLIK untuk meningkatkan efisiensi, integrasi data, dan mempercepat proses verifikasi dalam layanan informasi keuangan. Di Provinsi Sulawesi Selatan, dinamika penggunaan layanan SLIK berbasis digital juga menunjukkan tren peningkatan, meskipun masih dihadapkan pada tantangan infrastruktur jaringan dan literasi digital di beberapa wilayah, Data permintaan SLIK pada kantor OJK Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

Tabel 2 Data Permintaan Harian SLIK Tahun 2024 Pada Kantor OJK Provinsi Sulawesi Selatan

Bulan	*Offline*	*Online*	Total	Rata-Rata Layanan SLIK / HK
Jan	583	236	819	37.23
Feb	478	163	641	33.74
Mar	504	77	581	32.28
Apr	428	149	577	36.06
Mei	735	129	864	50.82
Jun	647	202	849	47.17
Jul	666	264	930	40.43
Agu	704	180	884	39.68
Sep	677	234	911	40.03
Okt	759	351	1110	40.92
Nov	516	222	738	42.16
Des	491	262	753	43.03
Total	7188	2469		
Total Keseluruhan				9657

Sumber: OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat

Data pada Tabel 2, menunjukkan bahwa permintaan SLIK oleh debitur setiap bulannya pada tahun 2024 kebanyakan masih diakses secara *Walk in* atau *offline* ke kantor OJK Sulawesi Selatan di Makassar. Melihat pentingnya peran lam mendukung ekosistem keuangan nasional serta meningkatnya terhadap layanan digital yang cepat dan aman, diperlukan strategi yang am implementasi digitalisasi sistem ini. Dengan memahami kekuatan,

Optimized using
trial version
www.balesio.com

kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada, OJK di tingkat regional, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan, diharapkan dapat mengoptimalkan layanan SLIK guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memperkuat stabilitas sektor jasa keuangan di era digital. keberhasilan transformasi digital dalam SLIK OJK akan bergantung pada seberapa baik organisasi dapat mengadopsi prinsip-prinsip *agile* dalam operasional mereka, untuk merespons dengan cepat terhadap dinamika pasar dan perubahan regulasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi peningkatan efektivitas sistem SLIK dengan menerapkan pendekatan Agile Performance Management, serta menganalisisnya secara komprehensif untuk mendukung penguatan tata kelola layanan informasi keuangan di OJK.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi aktual implementasi SLIK di Otoritas Jasa Keuangan saat ini?
2. Apa saja faktor-faktor Internal dan Eksternal dalam pengembangan SLIK di Otoritas Jasa Keuangan?
3. Bagaimana prinsip-prinsip *Agile Performance Management* dapat diterapkan dalam konteks pengelolaan SLIK?
4. Strategi Inovatif apa yang dapat dikembangkan melalui pendekatan Agile untuk meningkatkan kinerja Layanan OJK berdasarkan hasil analisis faktor internal dan eksternal yang telah dilakukan?

Optimized using
trial version
www.balesio.com

an Penelitian

dasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di
an penelitian adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis kondisi aktual pelaksanaan dan tantangan dalam pengelolaan SLIK di OJK.
2. Mengidentifikasi potensi penerapan prinsip *Agile Performance Management* dalam pengembangan SLIK.
3. Merumuskan strategi inovatif berbasis agile yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi SLIK.
4. Untuk memberikan rekomendasi strategi yang tepat berdasarkan analisis SWOT kepada OJK dalam menerapkan manajemen kinerja yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, yang telah diuraikan, penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kajian manajemen kinerja sektor publik, khususnya melalui pendekatan *Agile Performance Management* dalam konteks kelembagaan pemerintah atau regulator.

2. Manfaat Praktis:

   Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh OJK dalam menyusun dan mengimplementasikan strategi pengembangan SLIK secara lebih inovatif, adaptif, dan berorientasi pada kualitas layanan informasi keuangan.

3. Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

   Memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi implementasi

Optimized using
trial version
www.balesio.com

digitalisasi SLIK, sehingga dapat merumuskan kebijakan dan strategi yang lebih efektif dalam mendukung digitalisasi SLIK.

b. Menyediakan rekomendasi strategis yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan infrastruktur, meningkatkan kompetensi SDM, serta memperkuat sistem keamanan data, guna mendukung keberhasilan digitalisasi SLIK.

4. Bagi Lembaga Keuangan dan Stakeholder Terkait:

a. Memberikan gambaran yang jelas tentang tantangan dan peluang yang dihadapi dalam penerapan digitalisasi SLIK, serta bagaimana digitalisasi ini dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam memberikan layanan jasa keuangan kepada debitur.

b. Memfasilitasi lembaga keuangan untuk memahami pentingnya kolaborasi dengan OJK dalam pengembangan dan pengelolaan SLIK yang lebih baik.

5. Bagi Masyarakat dan Debitur:

Memberikan pemahaman tentang bagaimana digitalisasi SLIK dapat mempermudah akses informasi keuangan dan kredit, serta memberikan transparansi dalam proses pemberian kredit yang lebih akurat dan terpercaya.

6. Bagi Peneliti dan Pengembang Kebijakan:

Menyediakan data dan informasi yang berguna sebagai referensi dalam penelitian lebih lanjut terkait dengan digitalisasi sistem layanan jasa keuangan di sektor publik, khususnya dalam konteks pengelolaan informasi debitur dan pemberian kredit.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)

SLIK secara resmi diimplementasikan menggantikan Sistem Informasi Debitur (SID) sejak tanggal 1 Januari 2020. Hal ini juga dilandaskan aturan terkait dengan keberadaan SLIK yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 /POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur pada Sistem Layanan Informasi Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 menyatakan bahwa SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) adalah sistem informasi yang dikelola yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menyediakan informasi terkait debitur yang membantu lembaga keuangan dalam pengambilan keputusan. SLIK menggantikan sistem sebelumnya, Sistem Informasi Debitur (SID) yang dikelola oleh Bank Indonesia. Menurut (Ningsih, 2019) SLIK merupakan sebuah sistem layanan yang bertujuan untuk bertukar informasi antara bank satu dengan bank yang lainnya terkait riwayat pinjaman calon nasabah debitur sebagai bahan analisis kredit untuk menghindari resiko yang mungkin terjadi selama proses pembayaran angsuran nantinya. Menurut (Fibriyanti, 2018) SLIK merupakan sarana informasi yang dimiliki oleh lembaga perbankan untuk menilai kelayakan calon nasabah dalam menerima kredit. Selain itu, SLIK juga digunakan untuk memeriksa status calon nasabah, apakah mereka memiliki pinjaman di bank lain atau tidak.). SLIK juga terbukti efektif dalam menjalankan sebagai sistem informasi debitur, yang berkontribusi pada peningkatan ayanan dalam penyaluran kredit.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Manfaat keberadaan SLIK bagi kreditur menurut (Sumardani, 2020) yaitu sebagai berikut:

1) Proses analisis yang lebih cepat karena semua data terintegrasi dan dapat diakses dengan mudah.
2) Memperkecil risiko timbulnya kredit bermasalah di masa mendatang.
3) Mengurangi ketergantungan pemberi kredit terhadap agunan konvensional, karena adanya informasi yang lebih lengkap mengenai kemampuan finansial debitur. Kreditur dapat menilai reputasi debitur sebagai pengganti atau pelengkap agunan.
4) Mengurangi biaya operasional dalam proses pemberian kredit.
5) Mendorong transparansi pada kreditur dalam pengelolaan kredit.

Sedangkan manfaat Keberadaan SLIK Bagi debitur adalah sebagai berikut:

1) Mempercepat waktu dalam mendapatkan keputusan persetujuan kredit dari kreditur.
2) Bagi debitor baru, terutama pelaku usaha kecil dan menengah, mereka dapat memanfaatkan layanan kredit yang ditawarkan lembaga keuangan dengan mengandalkan reputasi keuangannya, sehingga tidak perlu memberikan agunan atau jaminan.
3) Tidak ada biaya yang dipungut atau gratis bagi debitur yang menggunakan layanan SLIK.
4) Mendorong debitur untuk menjaga reputasi kreditnya agar tetap baik.

2.2 Transformasi Digital dalam Sektor Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018, menjelaskan bahwa layanan jasa keuangan digital adalah layanan yang memungkinkan bank untuk mengakses informasi, berkomunikasi, dan melakukan keuangan melalui media elektronik. Layanan ini dikembangkan dengan atkan data nasabah untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat,

Optimized using
trial version
www.balesio.com

mudah, dan sesuai dengan kebutuhan nasabah (*customer experience*), serta memungkinkan nasabah untuk melakukan semua transaksi secara mandiri, dengan tetap memperhatikan aspek pengamanan yang diperlukan (Kussujaniatun, Sujatmika, & Laksana, 2022).

Menurut Binus University (2022), transformasi digital dalam sektor keuangan merupakan penerapan teknologi digital untuk mengubah cara lembaga keuangan beroperasi, dengan tujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan jasa keuangan kepada masyarakat luas. Proses transformasi digital di sektor keuangan merupakan langkah yang dilakukan secara luas dan intensif. Oleh karena itu, penerapannya perlu dilakukan dengan teliti dan hati-hati. Beberapa tahapan dalam digitalisasi layanan jasa keuangan dengan memanfaatkan antara lain:

1) Blockchain

   Teknologi blockchain adalah buku besar digital yang terdesentralisasi, di mana pengelolaannya dilakukan bersama oleh berbagai pihak. Sistem ini menawarkan tingkat keamanan dan transparansi yang lebih tinggi.

2) Visualisasi Data Secara Real-Time

   Transformasi digital di sektor keuangan melibatkan penggunaan teknologi berbasis cloud yang didukung dengan perangkat lunak yang mudah digunakan. Teknologi ini memungkinkan pengguna untuk berbagi data dan tren terbaru secara langsung kepada pemangku kepentingan.

3) Automasi Proses

   Sistem keuangan tradisional sering kali melibatkan tugas-tugas yang berulang dan membosankan. Dengan kemajuan teknologi, tugas-tugas etitif ini bisa diotomatisasi, menggantikan pekerjaan manual dengan angkat lunak yang lebih efisien.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

4) Teknologi AI

Teknologi kecerdasan buatan (AI) memberikan manfaat signifikan dalam sektor keuangan. Perusahaan dapat menggunakan AI untuk menganalisis data keuangan secara lebih efektif. Dengan dukungan data yang tepat, proses analisis yang dilakukan oleh AI dapat membantu perusahaan dalam membuat keputusan yang lebih baik dan lebih tepat.

Menurut (Sofyan & Hasibuan, 2024) menyebutkan bahwa digitalisasi dalam industri layanan jasa keuangan, terutama di sektor perbankan, telah menghasilkan perubahan yang menciptakan lingkungan yang lebih dinamis, efisien, dan inovatif. Peralihan ke layanan jasa keuangan digital, yang didorong oleh teknologi seperti kecerdasan buatan, analisis data, dan blockchain, memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi operasional, mempersonalisasi layanan, dan memperkuat keamanan transaksi keuangan.

2.3 Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengawasi industri jasa keuangan di Indonesia, juga bertanggung jawab dalam pengelolaan SLIK. OJK memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap SLIK, mengingat bahwa informasi yang terkandung di dalamnya sangat penting terkait dengan debitur. Melalui pengawasan terhadap SLIK, OJK juga dapat mempengaruhi pengawasan terhadap dana masyarakat serta lembaga keuangan yang terlibat (Larasari, 2023).

Secara umum, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugasnya sebagai regulator dan pengawas di berbagai sektor, termasuk perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga ıan, serta lembaga jasa keuangan lainnya (Sinaga, Nasution, & Siregar, dalam Pasal 5 Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas ıangan, mencantumkan mengenai fungsi OJK yaitu:22 “OJK berfungsi

Optimized using
trial version
www.balesio.com

menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan". Di dalam Pasal 6 Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, mencantumkan mengenai tugas OJK yaitu:23 "OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

1) Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan
2) Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
3) Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya."

Lebih lanjut peran OJK pada pengaturan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) tercantum di dalam Pasal 7 huruf b yang berbunyi: "Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:

1) Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank
2) Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank
3) Sistem informasi debitur
4) Pengujian kredit (credit testing); dan
5) Standar akuntansi bank

OJK juga memiliki kewenangan dalam pengawasan dalam pemberlakuan SLIK dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur pada Sistem Layanan Informasi Keuangan yang tercantum dalam Pasal 31, yaitu:

1) OJK melakukan pengawasan secara langsung dan/atau pengawasan ara tidak langsung terkait pelaksanaan SLIK terhadap Pelapor agaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

2) OJK berwenang melakukan pengawasan secara langsung dan/atau pengawasan secara tidak langsung terkait pelaksanaan SLIK terhadap Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
3) Pelapor wajib memberikan informasi kepada OJK dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

2.4 *Agile Performance Management*

Menurut (Perkin & Abraham, 2017) *agile performance* dapat dibentuk melalui tiga elemen utama: velocity (kecepatan organisasi dalam bertindak dan beradaptasi), focus (penekanan pada arah dan eksekusi strategi yang jelas), dan flexibility (kemampuan untuk bergerak cepat melalui struktur organisasi yang lebih fleksibel). Kombinasi dari ketiga elemen ini membentuk landasan yang kuat bagi perusahaan untuk tetap inovatif dan responsif dalam menghadapi perubahan yang cepat.

Agile Performance Management (APM) merupakan pendekatan manajemen kinerja yang adaptif, berkelanjutan, dan kolaboratif, yang menekankan pada fleksibilitas dan responsivitas terhadap perubahan lingkungan organisasi. Berbeda dengan sistem manajemen kinerja tradisional yang bersifat tahunan dan evaluatif, APM menekankan pada umpan balik berkala, percakapan berkelanjutan, dan penyusunan tujuan dinamis yang memungkinkan organisasi beradaptasi lebih cepat terhadap perubahan (Cappelli & Tavis, 2016).

Agile Performance Management (APM) sangat relevan mengingat OJK merupakan lembaga yang beroperasi dalam ekosistem jasa keuangan yang sangat dinamis dan dipengaruhi oleh faktor regulasi, digitalisasi, serta ekspektasi u kepentingan yang terus berkembang. Implementasi APM dalam sistem OJK dapat memperkuat kapabilitas kelembagaan dalam memberikan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

layanan publik yang responsif, transparan, dan berbasis pada prinsip governance yang kuat.

Menurut Risher (2016), organisasi sektor publik yang mengadopsi prinsip APM cenderung lebih efektif dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja dan mendorong budaya kerja yang adaptif. Hal ini penting bagi OJK karena tantangan dalam pengawasan industri keuangan memerlukan pengambilan keputusan yang cepat dan berbasis data, serta kolaborasi lintas fungsi yang solid.

Lebih lanjut, APM mendukung pencapaian kinerja layanan melalui mekanisme seperti:

1) Penetapan tujuan yang agile, *Objectives and Key Result* (OKR): Tujuan yang lebih fleksibel dan diperbarui secara berkala membantu unit layanan di OJK untuk beradaptasi dengan perubahan regulasi dan kebutuhan industri keuangan (Bernstein et al., 2016).
2) Umpan balik berkala dan coaching: Proses ini meningkatkan keterlibatan pegawai dan kualitas layanan karena memungkinkan perbaikan berkelanjutan secara real time (Pulakos et al., 2015).
3) Keterlibatan karyawan: Sistem ini mendorong keterlibatan pegawai OJK secara aktif dalam peningkatan proses kerja dan inovasi layanan, yang pada akhirnya meningkatkan kepuasan stakeholders.

Dengan kata lain, penerapan *Agile Performance Management* di OJK akan menciptakan sistem layanan yang lebih adaptif, efisien, dan responsif, sejalan dengan tuntutan tata kelola sektor keuangan yang kompleks dan terus berubah.

2.5 Kerangka Konseptual

OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat berperan penting dalam ɜsi dan mengatur sektor keuangan di daerah tersebut. OJK bertanggung lam memonitor dan memastikan bahwa implementasi digitalisasi layanan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

jasa keuangan, khususnya Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), berjalan dengan baik. Transformasi dari layanan *offline* ke *online* menjadi bagian dari upaya OJK untuk meningkatkan efisiensi dan keterjangkauan layanan jasa keuangan bagi masyarakat luas.

Penelitian ini dilakukan berdasarkan kerangka konseptual pada gambar 1. Tahapan pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi faktor internal yang berfungsi sebagai kekuatan dan kelemahan bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menerapkan digitalisasi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Faktor internal dianalisis dengan matriks IFE sedangkan faktor eksternal dianalisis dengan menggunakan matriks EFE. Skor total dari kedua matriks tersebut kemudian digabungkan ke dalam matriks IE untuk mengetahui posisi OJK dalam implementasi digitalisasi SLIK. Selanjutnya, dengan menggunakan analisis SWOT, alternatif-alternatif strategi dapat diperoleh untuk pengembangan implementasi digitalisasi SLIK oleh OJK.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Gambar 1 Kerangka Konseptual Penelitian

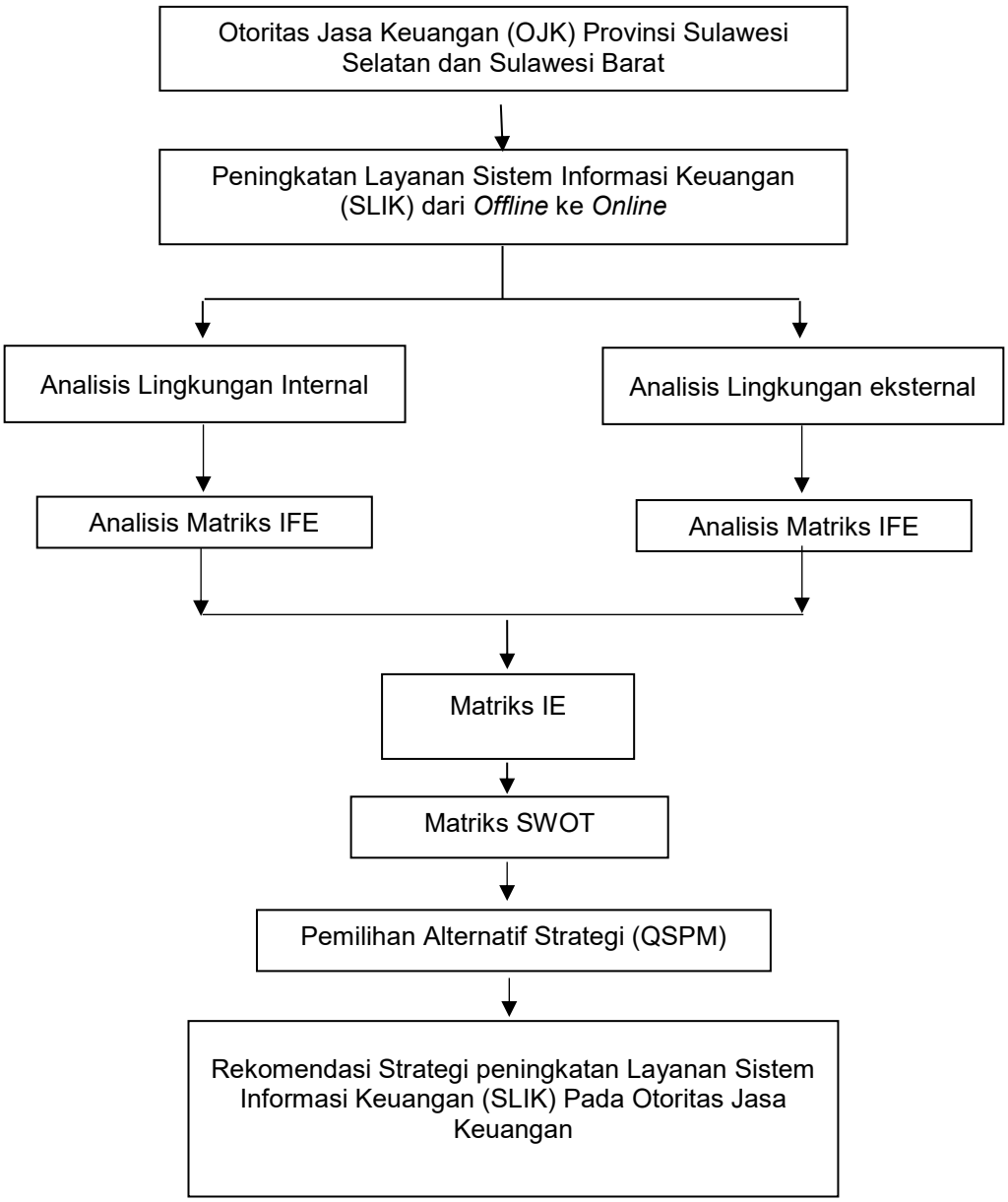

Optimized using
trial version
www.balesio.com